



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.027.423.913.838,00 (*satu triliun dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp62.691.826.620,00 (*enam puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.335.142.668,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp9.729.780.000,00 (*sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.364.995.912,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah*).

(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.261.908.040,00 (*Dua puluh miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu empat puluh rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp912.672.362.961,00 (*sembilan ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp867.390.892.000,00 (*delapan ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.281.470.961,00 (*empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp52.059.724.257,00 (*lima puluh dua miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.763.654.257,00 (*dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.296.070.000,00 (*tiga puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.057.461.481.675,00 (*satu triliun lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp663.938.887.107,00 (*enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp379.238.941.279,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.046.669.664,00 (*dua ratus lima puluh delapan miliar empat puluh enam ratus enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.522.897.500,00 (*dua puluh empat miliar lima ratus dua pulu dua ratus delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.130.378.664,00 (*dua miliar seratus tiga puluh ratus tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp379.238.941.279,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS;

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp257.905.873.068,00 (*dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.160.264.409,00 (*empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.337.278.500,00 (*lima puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.269.244.950,00 (*sebelas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp170.440.352,00 (*seratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp503.800.000 (*lima ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah*)
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.892.040.000,00 (*Tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.046.669.664,00 (*dua ratus lima puluh delapan miliar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bos.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.286.217.497,00 (*tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.441.702.954,00 (*seratus empat miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.591.045.222,00 (*satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.096.185.600,00 (*lima puluh tujuh miliar sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp340.950.000,00 (*tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan/atau jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.003.503,00 (*sepuluh juta tiga ribu lima ratus tiga rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.889.561.500,00 (*dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.522.897.500,00 (*dua puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

- (4) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.631.500.000 (*dua puluh miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.071.172.500,00 (*satu miliar tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

Pasal 12

- (1) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.130.378.664,00 (*dua Miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.384.666,00 (*empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.312.657.568,00 (*satu miliar tiga ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp370.336.430,00 (*tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp160.415.072.615,00 (*seratus enam puluh miliar empat ratus lima belas juta tujuh puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.533.234.467,00 (*tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.587.700.432,00 (*empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam ratus tujuh ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.203.891.751,00 (*delapan puluh satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp716.245.965,00 (*Tujuh ratus enam belas juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas
 - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.533.234.467,00 (*tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Alat Pengeboran;

- k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp513.082.240,00 (*lima ratus tiga belas juta delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.099.315.364,00 (*lima miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.185.682.590,00 (*dua miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.142.490.505,00 (*enam miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Studio, komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp504.792.980,00 (*lima ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.412.708.095,00 (*sembilan miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus delapan ribu sembilan puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp375.739.094,00 (*tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.105.992.749,00 (*tujuh miliar seratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp463.895.000,00 (*empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp41.265.590,00 (*empat puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).

- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp301.951.760,00 (*tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.850.000,00 (*lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.370.468.500,00 (*dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.586,700.432,00 (*empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen; dan
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.021.200.432,00 (*empat puluh dua miliar dua puluh satu juta dua ratus ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.565.500.000,00 (*satu miliar lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.203.891.751,00 (*delapan puluh satu miliar dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.943.753.000,00 (*lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Bangunan dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.333.093.676,00 (*dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp270.250.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ratus dua ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.656.795.075,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh enam ratus tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp716.245.965,00 (*tujuh ratus enam belas ratus dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.494.963,00 (*Seratus empat belas ratus empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp601.751.002,00 (*enam ratus satu ratus tujuh ratus lima puluh satu ribu dua rupiah*).

Pasal 19

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.197.209.387,00 (*dua belas miliar seratus sembilan puluh tujuh ratus dua ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp220.910.312.566,00 (*dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus sepuluh ratus tiga ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah*). Yang terdiri atas:
- Belanja Bagi Hasil; dan
 - Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.906.492.266,00 (*tiga miliar sembilan ratus enam ratus empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.003.820.300,00 (*dua ratus tujuh belas miliar tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf direncanakan Rp3.906.492.266,00 (*tiga miliar sembilan ratus enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp217.003.820.300,00 (*dua ratus tujuh belas miliar tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/kota.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi sebagaimana pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp161.562.494.000,00 (*seratus enam puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp55.441.326.300,00 (*lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp35.527.567.837,00 (*tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp35.527.567.837,00 (*tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*). Yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.527.567.837,00 (*tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp30.037.567.837,00) (*tiga puluh miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp30.037.567.837,00 (*tiga puluh miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkala adalah sebesar Rp0,00.

Pasal 25

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

Pasal 26

Lampiran Sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

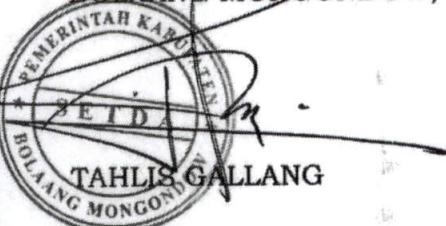
Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 Desember 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran I : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow
 Nomor : Nomor 50 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Desember 2020

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.691.826.620
4.1.01	Pajak Daerah	29.335.142.668
4.1.01.06	Pajak Hotel	5.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	5.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	200.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	200.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	780.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	410.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	410.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	365.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	365.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.550.596.700
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.550.596.700
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	5.550.596.700
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.225.000.000
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	17.425.000.000
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	17.425.000.000

4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	600.000.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	200.000.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	200.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.874.545.968
4.1.01.15.01	PBBP2	3.874.545.968
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	3.874.545.968
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	700.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	600.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	600.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	9.729.780.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.978.280.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.800.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	300.000.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	8.500.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	32.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	32.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	120.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	120.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	11.280.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	11.280.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	15.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	126.500.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	20.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000

4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.500.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	6.500.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	625.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	625.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	625.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.364.995.912
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.364.995.912
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.364.995.912
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.364.995.912
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.261.908.040
4.1.04.05	Jasa Giro	2.973.607.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.973.607.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.973.607.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	341.205.488
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	341.205.488
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	341.205.488
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	16.947.095.552
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.947.095.552
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.947.095.552
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	912.672.362.961
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	867.390.892.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	705.828.398.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26.453.145.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.772.388.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.675.125.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	545.181.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	17.291.081.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	41.051.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	527.960.118.000

4.2.01.01.02.0001	DAU	527.960.118.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	70.531.534.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.212.018.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.510.368.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	21.135.079.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	5.400.000.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.734.404.000
4.2.01.01.03.0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	377.500.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.110.311.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.410.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.400.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.194.816.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.924.490.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	6.818.732.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irrigasi-Penugasan	682.150.000
4.2.01.01.03.0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	8.621.666.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.883.601.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	52.982.897.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	264.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.128.422.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.569.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.544.700.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.518.840.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akkreditasi Puskesmas	1.131.536.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	737.441.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.236.557.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	322.573.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.153.685.000
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	293.750.000
4.2.01.05	Dana Desa	161.562.494.000

2/8/2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

			161.562.494.000
4.2.01.05.01	Dana Desa		161.562.494.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa		45.281.470.961
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		25.281.470.961
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil		25.281.470.961
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		3.243.532.720
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor		2.116.395.138
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		10.379.884.665
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		37.266.817
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan		9.504.391.621
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok		20.000.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan		20.000.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		20.000.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		52.059.724.257
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		21.763.654.257
4.3.01	Pendapatan Hibah		21.763.654.257
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		21.763.654.257
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		21.763.654.257
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		30.296.070.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		30.296.070.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan		30.296.070.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS		30.296.070.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	Jumlah Pendapatan	1.027.423.913.838
5	BELANJA		663.938.887.107
5.1	BELANJA OPERASI		379.238.941.279
5.1.01	Belanja Pegawai		257.905.873.068
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		202.348.964.007
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		200.692.964.007
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		

5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.656.000.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.968.376.878
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.968.376.878
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.697.046.375
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.697.046.375
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.108.791.800
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.108.791.800
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.078.870.875
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.078.870.875
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.432.608.846
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.432.608.846
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	972.766.323
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	972.766.323
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.497.964
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.497.964
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	771.900.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	771.900.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.520.050.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.520.050.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	49.160.264.409
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	25.728.163.910
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	25.728.163.910
5.1.01.02.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	23.432.100.499
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	23.432.100.499
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.337.278.500
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	569.167.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	10.000.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	30.261.412
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	46.796.480

5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	334.000.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	135.609.108
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.500.000
5.1.01.03.01.007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0
5.1.01.03.01.009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0
5.1.01.03.01.010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0
5.1.01.03.01.015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	42.101.500
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	22.500.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.600.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	6.000.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	564.000
5.1.01.03.02.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	750.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.000.000
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	4.687.500
5.1.01.03.02.004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0
5.1.01.03.02.005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0
5.1.01.03.02.006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0
5.1.01.03.02.011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0
5.1.01.03.02.017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0
5.1.01.03.02.022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0
5.1.01.03.02.025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	50.728.620.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	50.728.620.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.483.985.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.483.985.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	264.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	264.000.000

5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.333.805.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.023.161.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	310.644.000
5.1.01.03.07.001	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	915.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	915.600.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.269.244.950
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.840.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.840.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.061.600
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.061.600
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.179.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.095.554.850
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.095.554.850
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.823.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.823.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	273.200
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	273.200
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.589.723.300
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	21.923.300

5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.560.800.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	0
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.240.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.240.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	378.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	378.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	170.440.352
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.821.600
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.821.600
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.642.163
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.642.163
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	503.800.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	103.800.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	103.800.000
5.1.01.06.01.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	3.892.040.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	3.892.040.000

5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	3.892.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.046.669.664
5.1.02.01	Belanja Barang	72.286.217.497
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.253.050.596
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.226.679
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	463.322.328
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	816.918.870
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.444.293.951
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	90.167.000
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	73.180.579
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	36.437.500
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.574.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.405.475.871
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.779.327.316
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	15.462.104
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	626.434.600
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.025.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	5.370.013
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.587.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.444.763.512
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.939.972.860
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	336.292.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	73.367.999
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.750.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	53.680.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	458.901.678
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	16.164.940
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.061.225
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.171.157.645
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	404.087.080

5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.692.553.896
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1.287.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	400.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	720.000
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	412.500
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.319.686.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.814.620.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	346.605.035
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.311.549.211
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	260.955.000
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.584.231.456
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	238.425.017
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	8.800.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	87.450.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	176.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	203.669.989
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	202.940.500
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.011	Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Sувenir	0
5.1.02.01.01.012	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	0
5.1.02.01.01.014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	56.000
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.017	Belanja Bahan Peraga	0
5.1.02.01.01.019	Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan	5.247.000
5.1.02.01.01.020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	970.600
5.1.02.01.01.021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	0
5.1.02.01.01.025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	0
5.1.02.01.01.026	Belanja Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan	0
5.1.02.01.01.027	Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas	0

5.1.02.01.01.028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	75.000
5.1.02.01.01.032	Belanja Barang Pakai Habis Bangunan	1.248.000
5.1.02.01.01.036	Belanja Barang Pakai Habis Pangan	0
5.1.02.01.01.037	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	33.166.901
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	12.009.932
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.890.500
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	33.166.901
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.003	Belanja Bibit Ternak	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	68.640
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	607.200
5.1.02.01.02.007	Belanja Bahan dan Pangan	4.443.592
5.1.02.01.02.009	Belanja Bahan Percontohan	0
5.1.02.01.02.017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.020	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat	0
5.1.02.01.02.022	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	0
5.1.02.01.02.025	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	66.367.182
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	24.203.918
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	42.163.264
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	445.536.095
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	258.013.000
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.489.000
5.1.02.01.04.003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	869.095
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	110.165.000
5.1.02.01.04.006	Belanja Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.001	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0

5.1.02.01.05.002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0
5.1.02.01.05.003	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.05.005	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0
5.1.02.01.05.006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	0
5.1.02.01.06.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.001	Belanja Pakaian KORPRI	0
5.1.02.01.07.002	Belanja Pakaian Adat Daerah	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.01.07.004	Belanja Pakaian Olahraga	0
5.1.02.01.07.005	Belanja Pakaian Paskibraka	104.441.702.954
5.1.02.02	Belanja Jasa	90.673.197.347
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.560.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.200.146.600
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	774.800.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	387.400.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.900.000.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.960.000
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	3.980.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	28.149.582.277
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.160.000
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	209.400.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	3.600.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	912.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.630.252.500
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	279.255.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.914.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	

		3.546.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	336.000.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	2.844.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	744.517.500
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	25.700.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	117.600.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	71.500.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	9.000.000
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pengurus/Penyimpan BMD	7.717.500
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	277.560.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.071.705.470
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.245.783.300
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.579.730.200
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	500.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	587.750.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.718.897.000
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0
5.1.02.02.01.007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	0
5.1.02.02.01.008	Belanja Jasa Penyuluhan Non ASN	0
5.1.02.02.01.009	Belanja Jasa Rohaniawan	96.080.000
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirjen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.011	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0
5.1.02.02.01.012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	12.160.000
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000
5.1.02.02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	0
5.1.02.02.01.022	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.850.000
5.1.02.02.01.029	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0
5.1.02.02.01.041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	

5.1.02.02.01.047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	10.500.000
5.1.02.02.01.052	Belanja Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan, dan Penyampaian Barang	0
5.1.02.02.01.070	Belanja Pelayanan Keluarga Berencana	0
5.1.02.02.01.072	Belanja Jasa Advokat Bidang Perdata	0
5.1.02.02.01.074	Belanja Jasa Advokat Bidang Pidana	0
5.1.02.02.01.076	Belanja Pengolahan Air Limbah	0
5.1.02.02.01.078	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0
5.1.02.02.01.079	Belanja Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	36.100.000
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.000.829.600
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	1.575.000.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	425.829.600
5.1.02.02.02.001	Belanja Asuransi Kesehatan	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	18.975.000
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.975.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	909.594.500
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.002	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	364.610.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	544.984.500
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.541.025.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	965.845.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	2.415.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.572.765.000
5.1.02.02.05.009	Belanja Sewa Generator Set	0
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.434.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.007.391

5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	1.144.000
5.1.02.02.06.003	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/ HDTV	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	7.040.000
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	8.250.000
5.1.02.02.06.010	Belanja Sewa Alat Olahraga	0
5.1.02.02.06.011	Belanja Sewa Alat Kerja	0
5.1.02.02.06.012	Belanja Sewa Level/Panggung	0
5.1.02.02.06.0125	Belanja Sewa Jaringan Distribusi	9.007.391
5.1.02.02.06.013	Belanja Sewa Alat/Peraga	0
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0
5.1.02.02.07.001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0
5.1.02.02.07.004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.405.821.116
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.404.320.361
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	41.600.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	198.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	110.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	645.700.755
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	31.200.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	975.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	536.460.000
5.1.02.02.09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0
5.1.02.02.09.001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	80.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	456.460.000
5.1.02.02.09.002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0

5.1.02.02.10.003	Belanja Bimbingan Teknis	0
5.1.02.02.10.004	Belanja Diklat Kepemimpinan	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	50.000.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	50.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.265.768.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.447.003.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	781.400.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	37.365.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.591.045.222
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.591.045.222
5.1.02.03.02.002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	765.750.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	442.150.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	223.579.222
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	154.000.000
5.1.02.03.02.035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0
5.1.02.03.02.0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	3.696.000
5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	550.000
5.1.02.03.02.0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	1.320.000
5.1.02.03.02.116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0
5.1.02.03.02.139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0
5.1.02.03.03.006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0
5.1.02.03.04.003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0
5.1.02.03.04.031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irrigasi-Bangunan Air Irrigasi Lainnya	0
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.970.000
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	23.970.000
5.1.02.03.06.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	0

5.1.02.03.06.007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.096.185.600
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	525.154.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.142.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.096.185.600
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.246.737.600
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.458.774.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	285.500.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.105.174.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	360.142.500
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.012.000
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.012.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	340.950.000
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.003.503
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.003.503
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	333.950.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	333.950.000
5.1.02.05.01.001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.003.503
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.000.000
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0
5.1.02.05.03.001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	0
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.889.561.500
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.889.561.500
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.889.561.500
5.1.05	Belanja Hibah	24.522.897.500
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000

5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.005.725.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	21.505.725.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.458.225.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.047.500.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiikdas Negeri ...	0
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiikdas Swasta ...	1.017.172.500
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.017.172.500
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.017.172.500
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.130.378.664
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	447.384.666
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	200.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	200.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	247.384.666
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	247.384.666
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.312.657.568
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.312.657.568
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.312.657.568
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat ...	370.336.430
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	370.336.430
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	370.336.430
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	370.336.430

5.2	BELANJA MODAL	160.415.072.615
5.201	Belanja Modal Tanah	375.000.000
5.201.01	Belanja Modal Tanah	375.000.000
5.201.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	375.000.000
5.201.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0
5.201.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	375.000.000
5.201.01.03	Belanja Modal Lapangan	0
5.201.01.03.0002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir	0
5.202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.533.234.467
5.202.01	Belanja Modal Alat Besar	513.082.240
5.202.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0
5.202.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	0
5.202.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	513.082.240
5.202.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	354.200.000
5.202.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	16.500.000
5.202.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	142.382.240
5.202.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.099.315.364
5.202.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.796.315.366
5.202.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	310.765.400
5.202.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.565.000.000
5.202.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0
5.202.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	398.800.000
5.202.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.521.749.966
5.202.02.01.001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0
5.202.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.202.02.01.006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0
5.202.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.999.999
5.202.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	2.999.999
5.202.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	299.999.999
5.202.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	299.999.999

2/8/2021

			0
5.2.02.02.03.003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.185.682.590	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.620.811.997	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	
5.2.02.03.01.001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.620.811.997	
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0	
5.2.02.03.01.004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0	
5.2.02.03.01.006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0	
5.2.02.03.01.008	Belanja Modal Peralatan Las	542.034.597	
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	542.034.597	
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0	
5.2.02.03.02.005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0	
5.2.02.03.02.008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	0	
5.2.02.03.02.009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	22.835.996	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	799.999	
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0	
5.2.02.03.03.001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	22.035.997	
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0	
5.2.02.04.01.001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.142.490.505	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	851.562.528	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	299.184.998	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	552.377.530	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	
5.2.02.05.01.004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.276.004.315	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.624.681.419	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	13.310.000	
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	289.011.600	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.895.000	
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.327.106.298	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.999.998	
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran		

5.2.02.05.02.001	Belanja Modal Meubelair	0
5.2.02.05.02.003	Belanja Modal Alat Pembersih	0
5.2.02.05.02.004	Belanja Modal Alat Pendingin	0
5.2.02.05.02.005	Belanja Modal Alat Dapur	0
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.014.923.662
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	262.641.993
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	93.896.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	482.144.901
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	4.695.768
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	171.545.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	504.792.980
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	309.518.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	229.394.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	74.800.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.324.000
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0
5.2.02.06.01.001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0
5.2.02.06.01.002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0
5.2.02.06.01.003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	192.524.980
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	29.999.996
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.950.000
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	157.574.984
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0
5.2.02.06.02.003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	2.750.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	2.750.000
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	9.412.708.095
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.797.074.150
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	438.656.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	365.475.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	

5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.992.943.150
5.2.02.07.01.0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU	0
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.615.633.945
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.615.633.945
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	375.739.094
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	223.033.994
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	187.990.000
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	35.043.994
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	152.705.100
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	100.000.000
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	44.235.100
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	8.470.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.105.992.749
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.866.843.009
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	295.900.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.570.943.009
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.239.149.740
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	3.872.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.939.837.998
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	119.396.929
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	176.042.813
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	463.895.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	463.895.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	0
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0
5.2.02.12.02	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	0
5.2.02.12.02.0004	Belanja Modal Peralatan Bantu	41.265.590
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	41.265.590
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	2.249.990
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	

5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	39.015.600
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	301.951.760
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	301.951.760
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	301.951.760
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.850.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	15.850.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	15.850.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.370.468.500
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.370.468.500
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.370.468.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.586.700.432
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.021.200.432
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.131.200.432
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.884.281.771
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	315.000.000
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	1.380.000.000
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	284.642.378
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.521.198.301
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	18.583.371.348
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	500.000.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.247.332.875
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	831.242.400
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	211.200.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	708.062.498
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	415.286.861
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	50.000.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.099.582.000

5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.890.000.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	1.590.000.000
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	300.000.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.565.500.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.565.500.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.278.000.000
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	287.500.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.203.891.751
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	58.943.753.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	58.743.753.000
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	58.743.753.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	200.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	200.000.000
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	0
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	20.333.093.676
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	14.076.487.773
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	14.076.487.773
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.803.010.703
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.803.010.703
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	453.595.200
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	453.595.200
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	270.250.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	192.500.000
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	192.500.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	20.000.000
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	20.000.000
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	0

5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	57.750.000
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	57.750.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.656.795.075
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.656.795.075
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	1.601.795.075
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	55.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	716.245.965
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	716.245.965
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	114.494.963
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	114.494.963
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	601.751.002
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	601.751.002
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.197.209.387
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.197.209.387
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.197.209.387
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.197.209.387
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	12.197.209.387
5.4	BELANJA TRANSFER	220.910.312.566
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.906.492.266
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.906.492.266
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.906.492.266
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.906.492.266
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	217.003.820.300
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	161.562.494.000
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	161.562.494.000
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi	161.562.494.000
5.4.02.01.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ...	0
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	55.441.326.300

2/8/2021

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	55.441.326.300
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	55.441.326.300
5.4.02.02.01.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...	0
		Jumlah Belanja
		1.057.461.481.675
		Total Surplus/(Defisit)
		(30.037.567.837)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.527.567.837
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.527.567.837
6.1.01.05.01.001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	35.527.567.837
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan
		35.527.567.837
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.490.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.490.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.490.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.490.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.490.000.000
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
		5.490.000.000
		Pembiayaan Netto
		30.037.567.837

